

**ANALISIS RASIO KEUANGAN MENGGUNAKAN PERHITUNGAN
SHARE DAN GROWTH UNTUK MENILAI KINERJA KEUANGAN
PEMERINTAH KABUPATEN LANGKAT**

SKRIPSI

*Diajukan Guna Memenuhi Salah Satu Syarat
Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Ekonomi
Program Studi Akuntansi*



Oleh :

Nama : AFRIDA SALVIYANI
Npm : 1305170478
Program Studi : Akuntansi

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA
MEDAN
2017**

ABSTRAK

AFRIDA SALVIYANI. NPM. 1305170478. Analisis Rasio Keuangan Menggunakan Perhitungan Share dan Growth Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat, Medan, 2017. Skripsi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah yang dilihat dari Rasio Kemandirian dan Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth* Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Penelitian ini dilakukan di Badan Pengelolaan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat.

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif yakni penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan dan menyajikan data yang diterima dari Pemerintah Kabupaten Langkat berupa data-data Pendapatan dan Belanja Daerah, teknik pengumpulan data dilakukan dengan teknik dokumentasi.

Hasil penelitian ini berdasarkan atas analisis Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah belum mandiri dalam membiayai kegiatan Pemerintahannya disebabkan oleh Pemerintah Daerah masih tergantung pada bantuan dana eksternal (Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah). Dalam hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh data *Share* (rendah) dan *Growth* (Tinggi) kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kabupaten Langkat pada kuadran II, yaitu kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensial lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

Kata Kunci : Rasio Kemandirian, Perhitungan Analisis Share dan Growth, Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah.

ABSTRACT

AFRIDA SALVIYANI. NPM. 1305170478. Analysis of Financial Ratio and Regional Expenditure to Assess Financial Performance of Langkat Regency, Medan, 2017. Essay.

This study aims to find out how the Local Government Financial Performance seen from the Ratio of Independence and Calculation and Analysis Share and Growth Finance District Langkat. This research was conducted at the Agency of Management and Regional Assets (BPKAD) Langkat.

This study uses descriptive method of research conducted by collecting and presenting data received from the Government of Langkat District in the form of data Revenue and Expenditure Area, data collection techniques done by documentation techniques.

The result of this study is based on the analysis of Lurah District Realization Report shows that the Ratio of Regional Financial Independence has not been independent in financing its Government's activity caused by Local Government still depend on external fund aid (Central Government and Local Government). In the calculation of Share and Growth to the Budget Summary of Langkat Regency of Fiscal Year 2011 to 2015, it is obtained the data of Share (Low) and Growth (High) then with the mapping of regional financial capability based on Quadrant Method, Langkat District position in Quadrant II , that this condition is not ideal yet, but the area has local potential development, so PAD has a big role in Total Shopping. The contribution of PAD to Total Expenditure is still low but growth (PAD) is high.

Keywords: Independence Ratio, Calculation of Share and Growth Analysis, Local Government Financial Performance.

KATA PENGANTAR



Assalamu 'alaikum Wr. Wb,

Alhamdulillah, puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi yang berjudul **“Analisis Rasio Keuangan dan Belanja Daerah Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat ”** dapat diselesaikan.

Skripsi ini disusun berdasarkan hasil penelitian yang telah Penulis lakukan, sebagai syarat untuk dapat menyelesaikan studi pada Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Dalam kesempatan ini, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyelesaian Skripsi ini. Penulis ingin mengucapkan terimakasih kepada :

1. Yang teristimewa kepada ayahanda M. Said AR dan ibunda Rosnani, saudara penulis (Rina Afriani dan Aidil syahputra) tercinta yang telah memberika dorongan, bimbingan dan do'a restu yang tak terhingga, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini.
2. Bapak Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak H. Januri SE MM, M.Si selaku Dekan Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Ibu Fitriani Saragih. S.E, M.Si selaku Ketua Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Zulia Hanum SE, M.Si, selaku Sekertaris Jurusan Program Studi Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Ibu Hafsah, SE, M.Si, selaku dosen pembimbing penulis dalam menyelesaikan skripsi.
7. Bapak Drs. H. Mulyono M.s, selaku Sekretaris BAPPEDA Kabupaten Langkat yang telah membantu dalam penelitian ini serta yang telah memberikan ijin peneliti melakukan riset.
8. Bapak Syamsul Bahri yang membantu proses ijin melakukan riset di BPKAD Kabupaten Langkat.
9. Seluruh Staff Pengajar di Fakultas Ekonomi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara terutama biro Akuntansi terima kasih atas semua bantuan dan semua informasinya selama ini kepada penulis.
10. Kepada teman-teman saya Muhammad Tufik Hidayat, Sri Devi Handayani, Khairunita, Nurul Anisa, Erni Casmita Ritonga, Misra Wati, Siti Hajar yang tak henti hentinya memberikan dukungan dan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan Skripsi ini.
11. Seluruh teman-teman Akuntansi A siang yang tidak bisa saya sebutkan namanya satu persatu.serta semua pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna. Maka penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang dapat berguna untuk penyempurnaan karya ini. Akhir kata penulis harapkan Skripsi ini dapat

bermanfaat bagi pembaca dan semua pihak yang berkepentingan khususnya bagi penulis sendiri.

Wassalamu'alaikum. Wr. Wb

Medan, Oktober 2017
Penulis

AFRIDA SALVIYANI

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang	1
B. Identifikasi Masalah	7
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan dan Manfaat Peneliti	8
BAB II LANDASAN TEORI	10
A. Uraian Teori	10
1.1 Kinerja Keuangan Daerah Keuangan.....	10
1.1.1 Pengertian Kinerja.....	10
1.1.2 Pengertian Keuangan Daerah.....	11
1.1.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah.....	12
1.1.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah	16
1.2 Pengukuran Kinerja Pemerintah	17
1.2.1 Penertian Pengukuran Kinerja	17
1.2.2 Tujuan Penukuran Kinerja	18
1.3 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.....	19
1.3.1 Definisi APBD	19
1.3.2 Bentuk APBD	20
1.3.3 Pendapatan Asli Daerah	22

1.3.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah	23
1.4 Rasio Kemandirian Keuanan Daerah	23
1.5 Analisis Kemampuan Keuanan Daerah	25
B. Kerangka Berpikir	28
BAB III METODE PENELITIAN	31
A. Pendekatan Penelitian	31
B. Definisi Operasional Variabel	31
C. Tempat dan Waktu Penelitian	33
D. Jenis dan Sumber Data	34
E. Teknik Pengumpulan Data	34
F. Teknik Analisis Data	34
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	36
A. Hasil Penelitian	36
1.1 Gambaran Umum Kabupaten Langkat.....	36
1.2 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat	38
B. Deskripsi Data	38
1. Analisis Kinerja Keuangan Daerah	39
2. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah	42
C. Pembahasan	44
1.1. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	44
1.2. Perhitungan dan Analisis <i>Share</i> dan <i>Growth</i>	47
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat	4
Tabel 1.2	Share APBD Pemerintah Kabupaten Langkat	5
Tabel 1.3	Growth APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat	6
Tabel 1.4	Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran	6
Tabel 2.1	Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	25
Tabel 2.3	Penelitian Terdahulu	27
Tabel 3.1	Rincian Waktu Penelitian	33
Tabel 4.1	Rincian Wilayah Pemerintah Kabupaten Langkat	37
Tabel 4.2	Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat	40
Tabel 4.3	Share APBD Pemerintah Kabupaten Langkat	43
Tabel 4.3	Growth APBD Pemerintahan Kabupaten Langkat	43

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1	Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata Share dan Growth (%)	6
Gambar 1.2	Peta Kabupaten Lngkat	36

BAB I

PENDAHULUAN

E. Latar Belakang Masalah

Pemerintah adalah suatu organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan bangsa dan negara. Pemerintah daerah juga merupakan lembaga yang memiliki tugas untuk mengatur roda pemerintahan di daerah, pembangunan daerah, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Serta meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Peningkatan pelayanan tersebut akan berdampak pada peningkatan kesejahteraan masyarakat. Peningkatan tinggi kesejahteraan masyarakat salah satunya dapat dilihat dari tingkat pertumbuhan ekonomi suatu wilayah. Pertumbuhan ekonomi suatu wilayah dipengaruhi oleh terpadunya kontribusi beberapa faktor. Seperti investasi, inflasi, pemberdayaan PAD, laju pertumbuhan penduduk, kontribusi angkatan kerja, dan lain-lain.

Lembaga pemerintahan merupakan organisasi yang diberi kekuasaan untuk mengatur kepentingan bangsa dan negara, dan memberikan pelayanan kepada masyarakat luas. Sebagai organisasi nirbala, lembaga pemerintahan mempunyai tujuan untuk menyediakan layanan dan kemampuan meningkatkan layanan tersebut dimasa yang akan datang. Sebagai organisasi yang tidak berorientasi pada keuntungan/laba, pemerintah daerah memiliki tujuan utama yaitu memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, peningkatan keamanan dan kenyamanan, mutu pendidikan, mutu kesehatan, penegakan hukum, transportasi publik, dan penyediaan barang kebutuhan publik.

Sehubung dengan berkembangnya perubahan maupun globalisasi khususnya bidang ekonomi, sosial dan politik dalam era formasi ini sangat berdampak pada perubahan pola pikir masyarakat, terutama yang berkaitan dengan transparansi keuangan yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, demokratisasi pada keputusan pemberian pelayanan oleh pemerintah yang berorientasi pada kepuasan masyarakat dan penerapan hukum secara konsekuen. Oleh Karena itu lah sebagai konsekuensinya tentang dikeluarkannya ketetapan MPR yaitu Tap MPR Nomor XV/ MPR/ 1998 tentang “ Penyelenggaraan Otonomi Dearah, Pengaturan, Pembagian dan Pemanfaatan Sumber Daya Nasional yang berkeadilan serta perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah dalam Kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia” merupakan landasan hukum bagi dikeluarkannya UU No. 22 tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004 dan UU No. 25 tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah yang sekarang menjadi UU No. 33 tahun 2004.

Keberhasilan otonomi daerah tidak terlepas dari kinerja Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efesien, ekonomis, efektif, trasparan dan bertanggung jawab.

Kinerja keuangan daerah atau kemampuan daerah merupakan salah satu ukuran yang dapat digunakan untuk melihat kemampuan daerah dalam menjalankan otonomi daerah. Bentuk dari penilaian kerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD (Abdul Halim:2012).

Salah satu cara untuk menganalisa kinerja keuangan pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah dengan melakukan analisis rasio keuangan terhadap APBD yang telah diterapkan dan dilaksanakan. Penilaian kinerja pemerintah berdasarkan berbagai rasio keuangan, diantaranya Rasio Efektivitas dan Efisiensi, Rasio Keserasian, Rasio Pertumbuhan, Rasio Kemandirian.

Rasio Efektivitas menggambarkan kemampuan yang dicapai Pemerintah Daerah dalam merealisasikan Pendapatan yang direncanakan, kemudian dibandingkan dengan target yang ditetapkan berdasarkan potensi riil daerah. Dan untuk Rasio Efisiensi menggambarkan tingkat kemampuan pemerintah dalam mengefisienkan biaya yang dikeluarkan oleh pemerintah (Mardiasmo 2013).

Rasio Pertumbuhan bermanfaat untuk mengetahui apakah pemerintah dalam tahun anggaran bersangkutan atau selama beberapa periode anggaran, kinerja anggarannya mengalami pertumbuhan pendapatan atau belanja secara positif atau negatif (Mahmudi 2010).

Rasio Keserasian menggambarkan bagaimana pemerintah daerah memprioritaskan alokasi dananya pada Belanja Rutin dan Belanja pembangunannya secara optimal. Dan Rasio Kemandirian menggambarkan ketergantungan daerah terhadap sumber dana eksternal. Semakin tinggi Rasio Kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap pihak eksternal semakin rendah (Abdul Halim 2012).

Peneliti hanya memakai rasio kemandirian saja, dapat dilihat tabel dibawah ini menjelaskan tentang Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat.

Tabel 1.1
Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun	PAD	Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
2011	34.540.642.904,35	1.055.735.281.773,00	3,27%
2012	129.242.580.780,08	1.199.681.652.853,00	10,77%
2013	65.521.499.189,41	1.419.706.153.815,00	4,62%
2014	107.811.975.547,21	1.540.371.084.996,00	6,99%
2015	122.715.359.909,79	1.804.265.890.307,00	6,80%

Sumber: Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Dapat dilihat dari Tabel 1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 rendah, termasuk dalam pola hubungan instruktif yaitu hasil kerja berkisar dibawah 25%. Dari perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat sedikit lebih baik pada tahun 2012 dengan nilai(10,77%) dan kembali mengalami penurunan pada tahun 2013(4,62%).

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Langkat memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan instruktif. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal. (Abdul Halim, 2004:233).. Pemerintah daerah Kabupaten Langkat tidak menetapkan nilai standar rasio, secara tidak tertulis berdasarkan kinerja secara keuangan harus mencapai nilai diatas 100% yang dianggarkan.

Growth mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilannya yang dicapai dari periode ke periode berikutnya. *Growth* dikatakan baik, jika setiap tahunnya mengalami pertumbuhan positif atau mengalami peningkatan. Diawali dengan perhitungan dan analisis kinerja PAD melalui ukuran share dan growth kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran.

Share mengukur seberapa besar kontribusi PAD untuk membiayai belanja pemerintah daerah yang mana mencerminkan potensi peningkatan kapasitas PAD dari suatu kabupaten/kota. *Share* merupakan rasio PAD terhadap belanja rutin dan belanja pembangunan daerah.

Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth* diawali dengan perhitungan dan analisa PAD melalui ukuran *Share* dan *Growth* kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan Keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.

Tabel 1.2
Share APBD
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun	PAD	Total belanja	<i>Share</i>
-------	-----	---------------	--------------

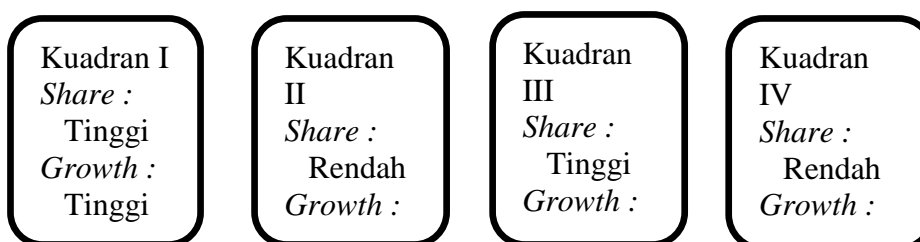
2011	34.540.642.904,35	1.063.869.134.063,82	3,2467004%
2012	129.242.580.780,08	1.329.229.102.792,52	9,723123%
2013	65.521/499.189,41	1.536.811.928.028,03	4,263469%
2014	107.811.975.547,21	1.605.301.211.464,57	6,7159966%
2015	122.715.359.909,79	1.819.224.899.770,10	6,745475%

Sumber : Data diolah

Tabel 1.3
Growth APBD
Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	PADi	PAD-1	Growth
2011	34.540.642.904,35	31.357.008.434,92	110,1528642%
2012	129.242.580.780,08	34.540.642.904,35	374,175377%
2013	65.521.499.189,41	129.242.580.780,08	50,696526%
2014	107.811.975.547,21	65.521.499.189,41	164,544272%
2015	122.715.359.909,79	107.811.975.547,21	113,8234962%

Sumber : Data diolah



Gambar 1.1 Peta Kemampuan Keuangan Berdasarkan Metode Kuadran Rata-rata Share dan Growth (%)

Tabel 1.4
Klasifikasi Status Kemampuan Keuangan Daerah Berdasarkan Metode Kuadran

KUADRAN	KONDISI
I	Kondisi paling ideal. PAD mengambil peran besar dalam Total Belanja dan daerah mempunyai kemampuan mengembangkan potensi local. Kondisi ini ditunjukkan dengan besarnya nilai share dan growth yang tinggi.
II	Kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensi local. Sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja . Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (growth) PAD tinggi.

III	Kondisi ini juga belum ideal. Peran PAD yang besar dalam Total Belanja mempunyai peluang yang kecil karena pertumbuhan PADnya kecil. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja Tinggi, namun pertumbuhan PAD rendah.
IV	Kondisi ini paling buruk. Peran PAD belum mengambil peran yang besar dalam Total Belanja dan daerah belum mempunyai kemampuan mengembangkan potensi lokal. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja dan pertumbuhan PAD terhadap Total Belanja dan Pertumbuhan PAD rendah.

Sumber : Bappenas 2003

Perhitungan dan Analisis share dan growth diawali dengan perhitungan dan analisa kinerja PAD melalui ukuran share dan growth kemudian mengklasifikasikan dengan pemetaan kemampuan keuangan Daerah berdasarkan Metode Kuadran.

Dilihat dari laporan keuangan setiap tahun nya dari 2011-2015 Share (rendah) dan Growth (tinggi). Dalam metode Kuadran, dapat dikatakan bahwa metode yg berkaitan termasuk pada Kuadran II yang mana Share (rendah) dan Growth(tinggi), yang mana metode kuadran Iikondisinya belum ideal,tetapi tmiliki peran besar dalam total belanja,sumbangan PAD terhadap total belanja masih rendah namun pertumbuhan(*growth*) tinggi.

Berdasarkan uraian diatas.Penulis tertarik untuk melakukan penelitian tentang Kinerja Keuangan Daerah.Adapun judul yang diangkat peneliti ini adalah **“Analisis Rasio Keuangan Menggunakan Perhitungan Share dan Growth Untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat ”**.

F. Identifikasi Masalah

Setelah melakukan penelitian pendahuluan pada Pemerintahan Kabupaten Langkat, maka identifikasi masalah yang ditemukan adalah :

1. Masih kecilnya Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Pemerintahan Kabupaten Langkat.
2. Terdapat rendahnya pada perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth* pada Kabupaten Langkat.

G. Rumusan Masalah

Rumusan Masalah

1. Mengapa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat Masih Rendah ?
2. Mengapa analisis *Share* dan *Growth* Belum Ideal pada Pemerintah kabupaten Langkat ?

H. Tujuan dan Manfaat Peneliti

1.1 Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah :

- a. Untuk mengetahui penyebab rendahnya keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat yang dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.
- b. Untuk mengetahui mengetahui belum idealnya Pemerintah Kabupaten Langkat.

1.2 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

1. Manfaat Pemerintahan

- a. Bagi peneliti, penelitian ini merupakan media untuk belajar memecahkan masalah secara ilmiah dan pengaruh penerapan Rasio Kemandirian Keuangan daerah dan Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*.
- b. Bagi Pemerintah Daerah, penelitian ini diharapkan dapat memberikan referensi atau sumbangan pemikiran Pemerintah Daerah dalam menganalisis Kinerja Keuangan guna meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah pada perkembangan zaman yang semakin kompetitif.
- c. Bagi Peneliti selanjutnya, semoga penelitian ini dapat menjadi tambahan pengetahuan dan sebagai bahan acuan untuk penelitian selanjutnya dalam bidang yang sama.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Uraian Teori

1.6 Kinerja Keuangan Daerah Keuangan

1.6.1 Pengertian Kinerja

Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama periode tertentu dibandingkan dengan berbagai kemungkinan. Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas.

Kinerja Keuangan adalah suatu ukuran kinerja yang menggunakan indikator keuangan. Analisis kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut.

Kinerja adalah hasil yang dicapai dari yang telah dilakukan, dikerjakan seseorang dalam melaksanakan kerja atau tugas. Kinerja merupakan prestasi kerja atau performance, yaitu hasil kerja selama priode tertentu dibanding dengan berbagai kemungkinan.

Salah satu cara untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya Halim (2008).

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006 menyatakan, Kinerja adalah keluaran atau hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kualitas yang terukur.

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* suatu organisasi. Secara umum dapat juga dikatakan bahwa kinerja merupakan prestasi yang dapat dicapai oleh organisasi dalam periode tertentu, sedangkan menurut Inpres No7 Tahun 1999 tentang akuntabilitas kinerja instansi pemerintah, kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran,tujuan,visi dan misi organisasi.

1.6.2 Pengertian Keuangan Daerah

Kinerja keuangan merupakan tingkat pencapaian suatu target kegiatan keuangan pemerintah daerah. Tingkat pencapaian ini diukur melalui indikator-indikator keuangan yang dapat dilihat dari hasil pertanggung jawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Kemampuan keuangan merupakan kesesuaian dan capaian hasil kinerja keuangan dengan target yg telah direncanakan. Pengukuran kinerja keuangan pemerintah dilakukan untuk memperbaiki kinerja pemerintah dalam pembuatan keputusan. Evaluasi terhadap kinerja dan kemampuan keuangan daerah sangat diperlukan agar pemerintah terpacu untuk meningkatkan kinerjanya di tahun berikutnya.

Abdul Halim (2008:) menyatakan:

Keuangan daerah memiliki ruang lingkup yang terdiri atas keuangan yang dikelola langsung dan kekayaan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang dipisahkan. Yang termasuk keuangan daerah yang langsung adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan barang-barang inventaris milik daerah. Dilain pihak, keuangan daerah yang dipisahkan meliputi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dapat dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dimiliki atau

dikuasai oleh negara. Keuangan daerah berperan penting dalam otonomi daerah karena dari keuangan daerah menggambarkan cerminan kemampuan daerah untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintah berdasarkan azas otonomi.

Menurut Abdul Halim (2008) keuangan daerah dapat diartikan sebagai hak dan kewajiban yang dinilai dengan uang, demikian pula segala sesuatu baik berupa uang maupun barang yang dapat dijadikan kekayaan daerah sepanjang belum dikuasai atau dimiliki negara atau daerah yang lebih tinggi atau pihak-pihak lain sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Asas umum pengelolaan keuangan daerah yang ditetapkan dalam peraturan pemerintah Nomor 58 tahun 2005 tentang pengelolaan Keuangan Daerah sesuai isi pasal 4 yaitu:

1. Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatuhan dan manfaat untuk masyarakat.
2. Pengelola keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu system yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan peraturan daerah.

1.6.3 Pengertian Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Mohamad Mahsun (2012), “Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang tertuang dalam *strategic planning* organisasi”.

Menurut Mohammad Mahsun (2012; 135), Analisa Laporan Keuangan merupakan alat yang digunakan dalam memahami masalah dan peluang yang terdapat dalam laporan keuangan.

Menurut Harahap (2004), “Rasio Keuangan adalah angka yang diperoleh dari hasil perbandingan dari satu pos laporan keuangan dengan pos lainnya yang mempunyai hubungan yang relevan dan signifikan (berarti). Misalnya antara utang dan modal, kas dan total aktiva, harga pokok penjualan dan penjualan, dan sebagainya”.

Salah satu alat untuk menganalisis Kinerja Keuangan Daerah dalam mengelola keuangan daerahnya adalah dengan melakukan analisis keuangan terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya. Meskipun demikian, dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilakukan meskipun pengakuntansian dalam APBD berbeda dengan laporan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim 2007).

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari suatu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecenderungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan cara membandingkan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerah relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah lainnya (Abdul Halim 2007)

Adapun pihak-pihak yang berkepentingan dengan rasio keuangan pada APBD (Abdul Halim, 2007) adalah :

1. Pihak eksekutif sebagai landasan dalam menyusun APBD berikutnya.
2. Pemerintah pusat/provinsi sebagai masukan dalam membina pelaksanaan pengelolaan keuangan daerah.
3. Masyarakat dan kreditor, sebagai pihak yang akan turut memiliki saham daerah, bersedia member pinjaman maupun membeli obligasi.

Dengan demikian beberapa cara yang dilakukan peneliti dalam mengukur Kinerja Keuangan Daerah salah satunya dengan Rasio Kinerja Keuangan Daerah. Beberapa rasio yang bias digunakan adalah : Rasio Kemandirian Keuangan Daerah.

Dalam hubungannya dengan kinerja keuangan di daerah, menurut penelitian yang dilakukan oleh Oesi Agustina(2013) dalam jurnalnya, kinerja keuangan daerah adalah tingkat pencapaian dari hasil kerja dibidang keuangan daerah meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang-undangan selama satu periode anggaran. Bentuk kinerja tersebut berupa rasio keuangan yang terbentuk dari unsur Laporan Pertanggung jawaban Kepala Daerah berupa Perhitungan APBD.

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa Kinerja Keuangan Daerah adalah tingkat capaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah dengan menggunakan indikator keuangan yang telah ditetapkan sebelumnya dengan tujuan untuk mengetahui kemampuan suatu daerah dalam mengelola keuangannya.

Kinerja keuangan pemerintah daerah didefinisikan sebagai berikut: Kinerja keuangan pemerintah daerah adalah tingkat pencapaian dari suatu hasil kerja dibidang keuangan daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah yang meliputi penerimaan dan belanja daerah dengan menggunakan system keuangan yang ditetapkan melalui suatu kebijakan atau ketentuan perundang –undangan selama satu periode anggaran.

Kinerja merupakan pencapaian atas apa yang direncanakan, baik oleh pribadi maupun organisasi. Apabila pencapaian sesuai apa yang direncanakan, maka kinerja yang dilakukan terlaksana dengan baik. Apabila pencapaian melebihi dari apa yang direncanakan dapat dikatakan kinerjanya sangat bagus begitu juga sebaliknya apabila pencapaian tidak mencapai apa yang direncanakan maka dapat dikatakan kinerja belum maksimal.

Salah satu alat untuk menganalisis kinerja keuangan pemerintah daerah adalah dengan melaksanakan analisis Rasio terhadap APBD yang telah ditetapkan dan dilaksanakannya (Abdul Halim, 2008: 230).

Penggunaan analisis rasio pada sektor publik khususnya terhadap APBD belum banyak dilakukan, sehingga secara teori belum ada kesepakatan secara bulat mengenai nama dan kaidah pengukurannya. Meskipun demikian dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang transparan, jujur, demokratis, efektif, efisien dan akuntabel, analisis rasio terhadap APBD perlu dilaksanakan meskipun kaidah pengakuntasiannya dalam APBD berbeda dengan keuangan yang dimiliki oleh perusahaan swasta (Abdul Halim, 2008).

Pengukuran Kinerja Pemerintah Daerah harus mencakup pengukuran Kinerja Keuangan. Hal ini terkait dengan tujuan organisasi pemda. Menurut Mohammad Mahsun (2012:1996) indikator Kinerja Keuangan Daerah meliputi :

1. Indikator Masukan (inputs), misalnya:

1. Jumlah yang dibutuhkan
2. Jumlah pegawai yang dibutuhkan
3. Jumlah infrastruktur yang ada.
4. Jumlah waktu yang digunakan

2. Indikator Proses misalnya

1. Ketaatan pada peraturan perundangan
2. Rata-rata yang diperlukan untuk memproduksi atau menghasilkan layanan jasa
3. Indikator keluaran (output).
4. Indikator Hasil (outcome).
5. Indikator Manfaat (Benefit).
6. Indikator Impack.

1.6.4 Analisis Kinerja Keuangan Daerah

Menurut Bastian (2006:112) “Kinerja anggaran adalah gambaran pencapaian pelaksanaan suatu keiatan/program/kebijakan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi ”.Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yan menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaranatau tujuan yang telah ditetapkan, dengan perhitungan indikator masukan (input), keluaran (output), hasil,manfaat dan dampak.

Menurut Mulyadi kinerja yang merupakan keberhasilan personal tim atau unit organisasi dalam mewujudkan sasaran strategik yang telah ditetapkan sebelumnya dengan prilaku yang diharapkan. Istilah kinerja sering digunakan untuk menyebut prestasi atau tingkat keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan individu maupun kelompok individu tersebut dan mempunyai kriteria keberhasilan yang ditetapkan.Kinerja tersebut berupa tujuan-tujuan atau target-target tertentu yang hendak dicapai.Tanpa ada tujuan atau target, kinerja seseorang atau organisasi tidak mungkin dapat diketahui karena tidak ada tolak ukurnya.

Salah satu cara yang dilakukan dalam mengukur kinerja pemerintah daerah dalam mengelola keuangannya adalah menggunakan analisis keuangan terhadap APBD yang telah dilaksanakan dan ditetapkan oleh pemerintah daerah (Abdul Halim, 2012).

1.7 Pengukuran Kinerja Pemerintah

1.7.1 Penertian Pengukuran Kinerja

Pengukuran kinerja sangat penting dilakukan untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan kepada publik yang lebih baik. Akuntabilitas menunjukkan bagai mana public dibelanjakan secara ekonomis , efisien, dan efektif. Pusat pertanggung jawaban berperan penting untuk menciptakan indikator kinerja adalah salah satu cara untuk mempertahankan kan prestasi berbagai pekerjaan dan pelayanan yang dilakukan pemerintah. Pengukuran kinerja membantu pejabat Pemerintah Daerah untuk menentukan tingkat pencapaian tujuan. Tidak hanya pengukuran kinerja juga membantu warga untuk mengevaluasi apakah tingkat pelayanan pemerintah setara dengan uang mereka keluarkan untuk pelayanan-pelayanan tersebut.

Sistem pengukuran kinerja sektor public adalah sistem yang bertujuan untuk membantu manajer public menilai pencapaian suatu strategi melalui alat ukur financial dan nonfinansial. Penukuran kinerja sektor public dilakukan untuk memenuhi tiga maksud. *Pertama*, pengukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk membantu memperbaiki kinerja pemerintah. Ukuran kinerja dimaksudkan untuk dapat membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran program unit kerja. Hal ini pada akhirnya akan meningkatkan efesiensi dan efektivitas organisasi sektor public dalam memberikan pelayanan sektor public. *Kedua*

,ukuran kinerja sektor public digunakan untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan. *Ketiga*, ukuran kinerja sektor public dimaksudkan untuk mewujudkan pertanggung jawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan (Ihyahul Ulum,2009:29-21).

1.7.2 Tujuan Penukuran Kinerja

Pengukuran kinerja pemerintah bertujuan untuk menilai sejauh mana mereka mampu menyediakan produk (jasa) yan berkualitas denan biaya yang layak. Bagi oranisasi pemerintah, kinerja pelayanan public merupakan salah satu keberhasilan pelaksanaan otonomi daerah (Dwiyanto,2003)

Oleh sebab itu dibawah ini merupakan tujuan pengukuran kinerja Menurut Madiasmo (2002:121) tujuan pengukuran kinerja Pengelolaan Keuangan Pemerintah Daerah adalah untuk memenuhi tiga maksud yaitu :

1. Untuk memperbaiki kinerja pemerintah, ukuran kinerja dimaksudkan untuk membantu pemerintah berfokus pada tujuan dan sasaran tujuan unit kerja, sehingga pada akhirnya akan meningkatkan efektivitas dan member pelayanan public.
2. Untuk mengalokasikan sumber daya dan pembuatan keputusan.
3. Untuk mewujudkan pertanggungjawaban public dan memperbaiki komunikasi kelembagaan.

1.7.3 Manfaat Pengukuran Kinerja

Tujuan sistem pengukuran kinerja menurut Ihyahul Ulum (2009), antara lain :

1. Memberikan pemahaman mengenai ukuran yang digunakan untuk menilai kinerja manajemen.
2. Memberikan arah untuk mencapai target kinerja yang telah ditetapkan.
3. Untuk memonitor dan mengevaluasi pencapaian kinerja dan membandingkan dengan target kinerja serta melakukan tindakan korektif untuk memperbaiki kinerja.

4. Sebagai dasar untuk memberikan penghargaan dan hukuman secara objektif atas pencapaian prestasi yang diukur sesuai dengan sistem pengukuran kinerja yang telah disepakati.
5. Sebagai alat komunikasi antara bawahan dan pimpinan dalam rangka memperbaiki kinerja organisasi.
6. Membantu mengidentifikasi apakah kepuasan pelanggan sudah terpenuhi.
7. Membantu memahami proses kegiatan instansi pemerintah.
8. Memastikan bahwa pengambilan keputusan secara objektif.

1.8 Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

1.8.1 Definisi APBD

Menurut Moh. Mahsun, dkk, 2011:81 anggaran pendapatan dan Belanja Daerah adalah daftar yang memuat rincian penerimaan daerah dan pengeluaran/belanja daerah selama satu tahun. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah ditetapkan dengan peraturan daerah untuk masa satu tahun. Mulai dari 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Dalam peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 tahun 2014 Tentang Pedoman Penyusunan Anggaran 2015 Pasal 1 ayat 1, pengertian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan Daerah.

Menurut Abdul Halim (2012), pada era orde lama terdapat pula definisi APBD yang dikemukakan oleh Wajong, 1962:81, yaitu rencana pekerjaan Keuangan (*financial workplan*) yang dibuat untuk suatu jangka waktu tertentu. Ketika badan legislatif (DPRD) memberikan kredit pada badan eksekutif (kepala

daerah) untuk melakukan pembiayaan kebutuhan rumah tanga daerah sesuai dengan rancangan yang menjadi dasar (*grondslag*) penetapan anggran .dan yang menunjukkan semua penghasilan untuk menutup pengeluaran tadi. APBD adalah suatu anggaran daerah yang memiliki unsur-unsur sebagai berikut:

- 1) Rencana kegiatan suatu daerah, beserta uraian secara rinci.
- 2) Adanya sumber penerimaan yang merupakan target minimal untuk menutupi biaya terkait aktivitas tersebut, dan adanya biaya yang merupakan batas maksimal pengeluaran yang akan dilaksanakan.
- 3) Jenis kegiatan dan proyek yang dituangkan dalam bentuk angka.
- 4) Periode anggaran, biasanya satu tahun.

Siklus APBD terdiri atas perencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan pemeriksaan,serta penyusunan dan perhitungan APBD, penyusunan dan penetapan perhitungan APBD merupakan pertanggung jawaban APBD. Pertanggung jawaban itu dilakukan dengan menyampaikan perhitungan APBD kepada menteri dalam negeri untuk pemerintah daerah tingkat II, jadi pertanggungjawaban bersifat vertikal.

1.8.2 Bentuk APBD

Bentuk anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 29 Tahun2002 adalah :

1. Pendapatan, yang dibagi menjadi tiga kategori :
 1. Pendapatan Asli Daerah, merupakan semua penerimaan yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah.
 2. Dana perimbangan, merupakan dana yang bersumber dari penerimaan anggaran pendapatan belanja negara yang dialokasikan pada daerah untuk membiayai kebutuhan dananya.

3. Lain-lain pendapatan yang sah, meliputi pendapatan daerah, belanja daerah, pinjaman, ekuitas dana dan cadangan, asset dan sisa anggaran.
2. Belanja, yang diolongkan menjadi tiga, yaitu :
 1. Belanja Aparatur Daerah, merupakan belanja yang manfaatnya tidak secara langsung dinikmati oleh masyarakat tetapi dirasakan secara langsung oleh aparatur, contohnya pembelian kendaraan dinas, pembelian bangunan gedung dan lain sebagainya.
 2. Belanja Pelayanan Publik, merupakan belanja yang manfaatnya dapat dinikmati secara langsung oleh masyarakat umum, contohnya pembangunan jembatandan jalan raya sebagainya.

Pada organisasi pemerintahan Daerah laporan keuangan yang dikehendaki diatur oleh peraturan pemerintah (PP) Nomor 105 Tahun 2000, Kepmendagri Nomor 29 Tahun 2002 pasal 81 ayat (1) serta lampiran XXIX butir (1), PP Nomor 58 tahun 2006 tentang pengelolaan keuangan daerah, Pemendagri Nomor 13 tahun 2003 Tahun2006 tentan pedoman pengelolaan keuangan daerah, PP Nomor 24 Tahun 2005 mengenai Standar Akuntansi Pemerinyah yang diperbarui lagi melalui PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintah.

Sesuai PP nomor 71 Tahun 2010, Laporan Keuangan terdiri dari :

1. Laporan Realisasi Anggaran (LRA)
2. Laporan Perubahan Saldo anggaran lebih
3. Neraca
4. Laporan Operasional (LO)
5. Laporan Arus Kas (LAK)
6. Laporan Perubahan Ekuitas (LKE)

7. Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK)

Laporan Realisasi Anggaran (LRA) yang dipublikasikan pemerintah daerah memberikan informasi yang bermanfaat untuk menilai kinerja keuangan daerah. LRA menjadi salah satu laporan pertanggungjawaban keuangan daerah yang utama, karena anggaran dalam pemerintah merupakan tulang punggung penyelenggaraan pemerintah. Anggaran memiliki peran penting sebagai alat stabilisasi, distribusi, alokasi sumber daya public, perencanaan dan pengendalian organisasi serta penilaian kinerja. Laporan Realisasi Anggaran menduduki prioritas yang lebih penting dan merupakan jenis laporan keuangan daerah yang paling dahulu dihasilkan sebelum kemudian disyaratkan untuk membuat laporan arus kas.

Menurut Pemdagri No. 4 tahun 2008 Laporan Realisasi Anggaran adalah sebagai berikut: Laporan Realisasi Anggaran adalah laporan yang menyajikan informasi realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan pemerintah daerah dalam suatu periode tertentu.

1.3.3 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan Asli Daerah adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang dalam hal ini adalah UU No 33 Tahun 2004. Pendapatan Asli Daerah bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi.

1.3.4 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Dari pengertian Pendapatan Asli daerah di atas, penjelasan masing-masing sumber pendapatan asli daerah tersebut adalah sebagai berikut :

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

Merujuk pada Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 Pasal 1 ayat 18 menyebutkan Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan perundang-undangan. Sebagai tambahan pengertian PAD menurut para ahli dua pendapat yakni menurut Abdul Halim (2007:96) “Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah. Sedangkan berdasarkan pendapat yang dikemukakan Mardiasmo (2002:132) “PAD adalah penerimaan daerah dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah.

Dari berbagai pendapat mengenai PAD diatas dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan daerah yang sumbernya berasal dari daerah itu sendiri berupa dana yang pemerolehannya dikelola oleh pemerintah daerah beserta jajarannya dan telah diatur oleh peraturan perundang-undangan.

1.9 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio kemandirian Keuangan Daerah (RKKD) menunjukkan tingkat kemampuan suatu daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah,

pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain: Bagi hasil pajak, Bagi hasil pajak sumber daya alam, Dana alokasi umum dan Alokasi khusus, Dana darurat dan Pinjaman (Abdul Halim 2007).

Menurut Abdul Halim, (2007) Kemandirian Keuangan Daerah atau ekonomi fiskal menunjukkan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat”.

Demikian pula sebaliknya, semakin rendah rasio kemandirian, semakin rendah partisipasi masyarakat dalam membayar pajak dan retribusi daerah yang merupakan komponen utama Pendapatan Asli Daerah (PAD), semakin tinggi masyarakat membayar pajak dan retribusi daerah akan menggambarkan tingkat kesejahteraan masyarakat yang semakin meningkat.

PAD merupakan suatu pendapatan yang digali murni dari masing-masing daerah, sebagai sumberkeuangan daerah yang digunakan untuk membiayai pengadaan pembelian dan pemeliharaan sarana dan prasarana pembangunan daerah yang tercermin dalam anggaran pembangunan.

Abdul Halim (2001:261) mengemukakan mengenai pola hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah terutama pelaksanaan undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah ditunjukkan oleh besarnya Pendapatan Asli Daerah dibandingkan dengan Pendapatan Daerah yang berasal dari sumber lain (pendapatan transfer) antara lain : Dana Bagi Hasil; Bukan Pajak, Dana Alokasi Umum , Dana Alokasi Khusus, Transfer Pemerintah Pusat, Dana penyesuaian, Transfer Pemerintah Provinsi dan Pendapatan Bagi Hasil Pajak.

Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal. (Abdul Halim, 2004:233).

Rumus yang digunakan untuk menghitung Rasio Kemandirian adalah :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

Sebagai pedoman pola hubungan dengan kemandirian keuangan daerah dapat dilihat pada Tabel 2.1 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Presentase Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Kemampuan Daerah	Kemandirian	Pola Hubungan
Dibawah 60	0 – 25	Instruktif
60 – 80	25 – 50	Konsultif
80 – 90	50 – 75	Partisipatif
90 – 100	75 – 100	Delegatif

Sumber: (Abdul Halim)

1.10 Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*

Share dan Growth menggambarkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mengambil peran total belanja, juga dapat mengukur seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang

telah dicapai dari satu periode ke periode berikutnya. Kondisi ideal ditunjukkan dengan besarnya nilai *share* dan *growth* yang tinggi (Muhibtari,2014).

Share dan *Growth* dapat dapat dihitung dengan rumus sebagai berikut :

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PADi}{PADi-1} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah Periode i-1

Peta kemampuan keuangan daerah menggambarkan kemampuan daerah dalam mengembangkan potensi lokal, yang diklasifikasikan dari hasil perhitungan *share* dan *growth* dengan menggunakan peta kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuuadran (Muhibtari,2014). Metode kuadran adalah salah satu cara menampilkan peta kemampuan keuangan daerah. Peta kemampuan keuangan daerah dapat dianalisis menggunakan tabel klasifikasi status kemampuan keuangan daerah berdasarkan metode kuadran.

Analisis Kemampuan Keuangan Daerah Dengan Metode Kuadran, yang dimaksudkan metode kuadran adalah salah satu caramenampilkan peta kemampuan keuangan daerah masing-masing kuadran ditentukan besaran nilai *Share* dan *Growth*.

Adapun penelitian terdahulu yang berkaitan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Layra KS (2016)	Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan.	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa Rasio Kemandiriannya masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakankuran mampunya pemerintah daerah kota medan dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah seHINGA menyebabkan pemerintah daerah kota Medan bergantung pada Pemerintah pusat.
2.	Puput Risky Pramita	Analisis Rasio keuangan untuk menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013	Hasil penelitian ini menyatakan bahwa analisis rasio diatas pemerintah kabupaten kebumen bahwa rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada pemerintah kabupaten kebumen memiliki rata-rata kemandiriannya msih tergolong rendah sekali dan dalam katagori pola hubungan instruktif. Jadi kemandirian keuangan DPPKAD kabupaten kebumen secara keseluruhandapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masihsangat tinggi.
3.	Anom Rubit Yasudi (2016)	Analisis Kinerja Keuangan dengan Rasio dan <i>Share Growth</i> pada Dinas Pendapatan Kota	Hasil penelitian ini menyatakan rata-rata kinerja keuangan daerah yan belum stabil atau belum begitu baik.dimana hasil perhitungan setiap tahunnya

		kendari.	mengalami <i>trend</i> positif dan <i>trend</i> negatif. Hal ini disebabkan Pemerintah Kota Kendari masih kurang mampu dalam menciptakan kemandirian dan kemampuan pemerintah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah, pembangunan dan pelayanan masyarakat
4.	Astria Nabila Muhibtari (2014)	Analisis Rasio Keuangan Anggran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah Kota Magelang.	Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kota Magelang masih Belum ideal, dilihat dari hasil perhitungan <i>Share</i> dan <i>Growth</i> terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Magelang.

B. Kerangka Berpikir

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan, program dan kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Indikator kinerja merupakan ukuran kualitas yang telah ditetapkan dengan memperhatikan indikator masukan, keluaran, hasil manfaat dampak. Indikator kinerja harus merupakan suatu yang dapat dihitun dan diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai kinerja keuangan suatu daerah.

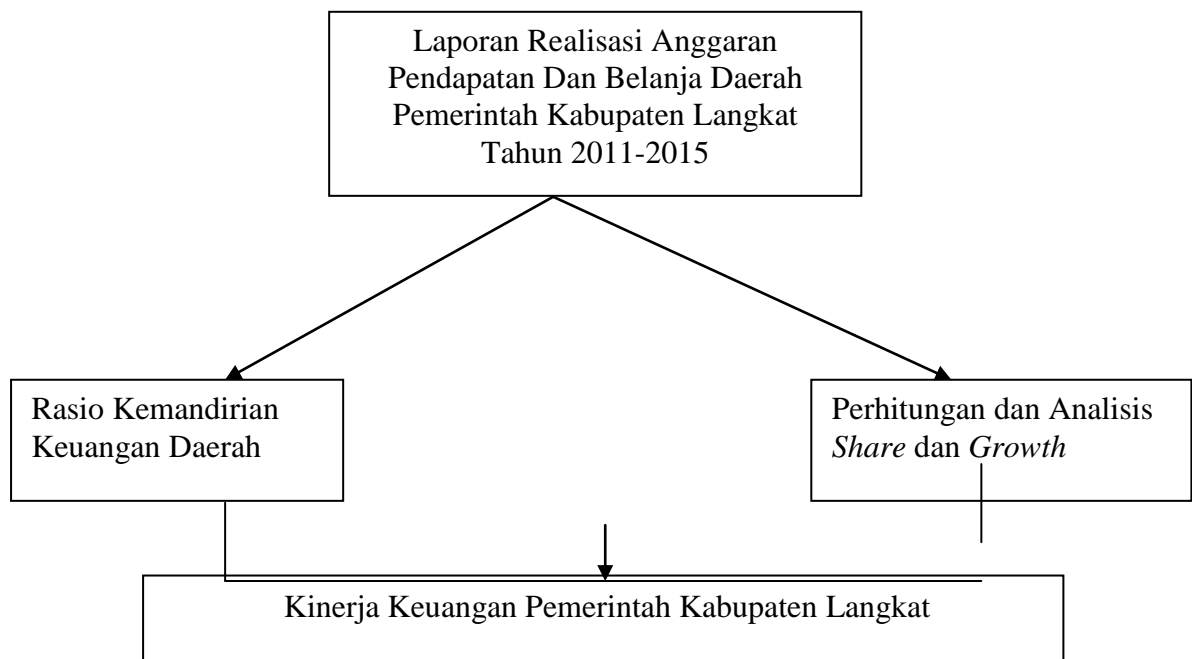
Menganalisis Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat adalah suatu proses penilaian mengenai tingkat kemajuan pencapaian pelaksanaan

pekerjaan/kegiatan Kabupaten Langkat dalam bidang keuangan untuk kurun waktu tertentu.

Untuk mengetahui bagaimanakah kinerja keuangan pemerintah daerah Kabupaten Langkat yaitu dengan melakukan analisis laporan keuangan dengan menggunakan analisis keuangan terhadap APBD. Dengan menggunakan rasio Kemandirian dan Perhitungan dan Analisis *Share dan Growth* tersebut dapat diketahui Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat. Jika Rasio diatas menunjukkan hasil angka yang sesuai target, maka kinerja keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat dapat dikatakan baik.

Analisis rasio keuangan APBD dilakukan dengan membandingkan hasil yang dicapai dari satu periode dibandingkan dengan periode sebelumnya sehingga dapat diketahui bagaimana kecendrungan yang terjadi. Selain itu dapat pula dilakukan dengan rasio keuangan daerah lain yang terdekat ataupun yang potensi daerahnya relatif sama untuk dilihat bagaimana posisi rasio keuangan pemerintah daerah tersebut terhadap pemerintah daerah lainnya.

Oleh sebab itu disini peneliti hanya menitik beratkan penelitian kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan tahun 2015 dengan menggunakan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah dan Perhitungan dan Analisis *Share dan Growth* .berikut dapat dijelaskan kerangka berpikir dalam penelitian ini seperti gambar dibawah ini.



Gambar 2.1
Kerangka Berpikir

BAB III

METODE PENELITIAN

G. Pendekatan Penelitian

Pendekatan ini menggunakan jenis pendekatan deskriptif, penelitian deskriptif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengetahui variabel mandiri, baik satu variabel atau lebih (independen) tanpa membuat perbandingan, atau menghubungkan dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2007, hal. 11). Penelitian ini digunakan untuk menggambarkan data yang telah terkumpul sebagaimana adanya.

H. Definisi Operasional Variabel

Definisi operasional adalah suatu usaha untuk melakukan pendekatan sejauh mana variabel berpengaruh terhadap variabel lainnya.

1.1 Kinerja Keuangan Pemerintah

Keuangan adalah bidang-bidang akuntansi yang menyediakan laporan keuangan untuk pihak luar perusahaan, seperti laporan laba rugi, laporan perubahan laba ditahan, laporan posisi keuangan, dan laporan arus kas.

1.2 Rasio Keuangan

Rasio keuangan merupakan alat ukur yang digunakan untuk menilai kinerja dan kondisi keuangan perusahaan. Rasio keuangan merupakan perbandingan antar satu atau lebih akun laporan yang tujuannya adalah untuk mengukur kemampuan perusahaan mengelola bisnisnya.

Kinerja keuangan pada dasarnya dilakukan untuk menilai kinerja dimasa lalu dengan melakukan berbagai analisis sehingga diperoleh posisi keuangan yang mewakili realitas entitas dan potensi-potensi kinerja yang akan berlanjut. Dimana kinerja keuanan daerah dapat diukur dengan menggunakan rasio-rasio keuangan daerah yaitu :

1.3 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah adalah kemampuan Pemerintah Daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan dan pelayanan masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan daerah. Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan pendapatan daerah yang berasal dari sumber lainnya misalnya bantuan pemerintah pusat (transfer pusat) maupun dari pinjaman .

Untuk menilai tinggi rendahnya Rasio kemandirian Pemerintah Daerah, bias mengacu pada Kepmendagri No. 690.900.327 Tahun 1996, sebagai berikut :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

1.4 Perhitungan Analisis Share dan Growth

Langkah-langkah dalam menganalisis *Share* dan *Growth* sebagai berikut:

- a. Membuat tabel indeks Elastisitas Belanja Langsung terhadap PAD, indeks pertumbuhan PAD, dan indeks peran PAD.
- b. Menghitung Share dan Growth dengan persamaan:

$$Share = \frac{PAD}{Total\ Belanja} \times 100\%$$

$$Growth = \frac{PADi}{PADi-1} \times 100\%$$

Keterangan :

PAD = Pendapatan Asli Daerah

PAD_i = Pendapatan Asli Daerah periode i

PAD_{i-1} = Pendapatan Asli Daerah Periode i-1

I. Tempat dan Waktu Penelitian

Penelitian dilakukan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Langkat yang beralokasi di Jln. Khairil Anwar No. 1 Stabat. Penelitian ini dimulai bulan Juli 2017 sampai bulan Oktober 2017.

Adapun jadwal Penelitian akan dijelaskan dalam tabel dibawah ini:

Tabel 3.1
Rincian Waktu Penelitian

No	Kegiatan	Juli 2017				Juli 2017				Agustus 2017				September 2017				Oktober 2017			
		1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
1	Proses pengajuan judul			■	■																
2	Penyusunan proposal					■	■	■	■												
3	Bimbingan proposal									■	■	■	■								
4	Seminar proposal													■							
5	Penyusunan skripsi														■	■	■				
6	Bimbingan skripsi																	■	■	■	■
7	Sidang meja hijau																				■

J. Jenis dan Sumber Data

1.1 jenis Data

Jenis data dalam penelitian ini termasuk data kuantitatif, yaitu data yang berbentuk angka-angka dan dapat dihitung seperti laporan keuangan.

1.2 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah data skunder. Data skunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusundalam arsip atau data documenter baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan sumber data dalam penelitian ini adalah Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Langkat dimulai dari tahun 2011, 2012, 2013, 2014, 2015.

K. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah:

- Dokumentasi

Dalam penelitian ini, teknik pengumpulan data dilakukan dengan cara memperoleh data dari Kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (PBKAD) Kabupaten Langkat yang berupa pencatatan yang bersumber dari dokumen, dan laporan hasil dari anggaran dan realisasi pendapatan dan belanja daerah Kabupaten Langkat dimulai dari Tahun 2011-2015.

L. Teknik Analisis Data

Metode teknik analisis data menggunakan metode deskriptif pendekatan kuantitatif yang merupakan metode yang digunakan untuk merumuskan perhatian

terhadap masalah yang dihadapi, dimana data yang dikumpulkan, disusun dan dianalisis sehingga dapat memberikan informasi masalah yang ada. Adapun teknik analisa data dapat dilakukan dengan beberapa tahap yaitu :

Tahap Pertama:

1. Mengumpulkan data yang dibutuhkan untuk penelitian berupa Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011 samapai tahun 2015
2. Menghitung rasio-rasio kinerja keuangan APBD pada Laporan Realisasi APBD Tahun 2011 samapai tahun 2015
3. Membandingkan rasio kinerja keuangan APBD 5 tahun terakhir.
4. Menginteprestasikan terhadap kriteria maupun pola hubungan rasio kinerja keuangan APBD.

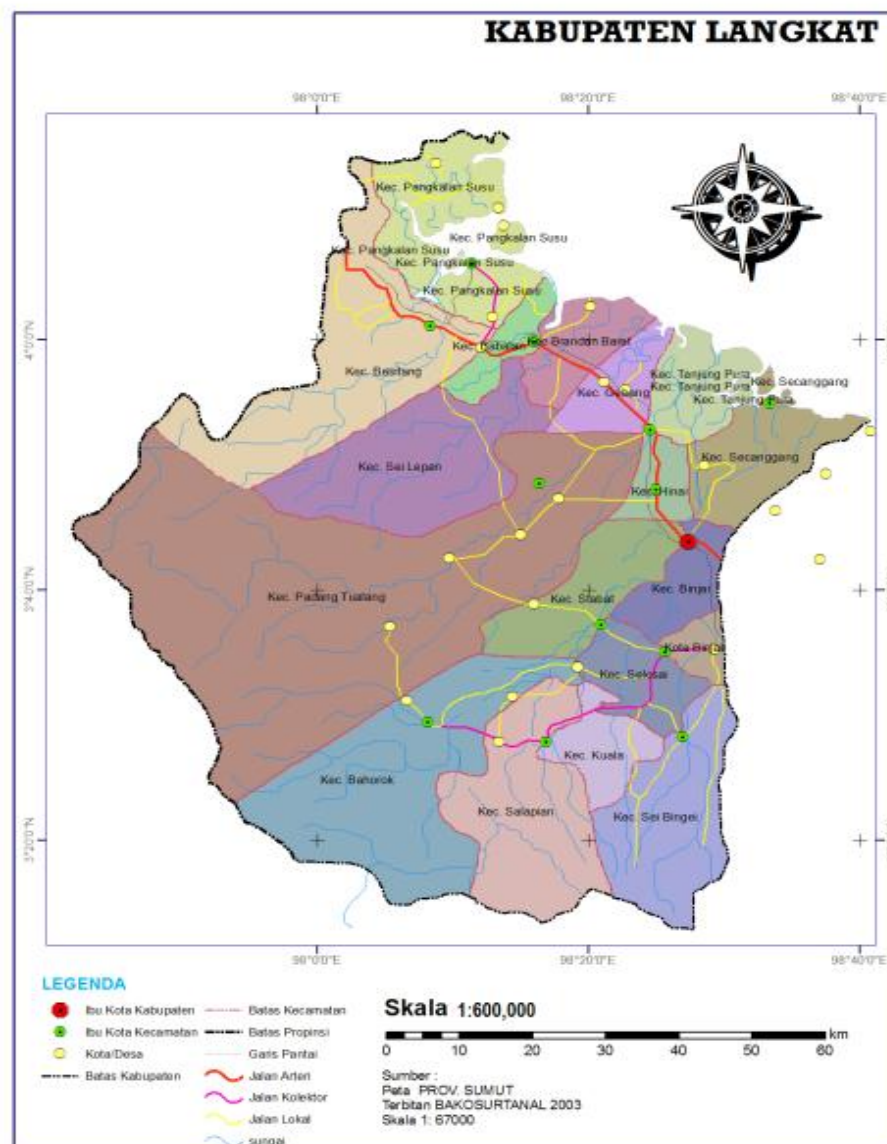
Tahap kedua : Menganalisis hasil temuan penelitian kemudian memberikan kesimpulan dan saran sehingga memberikan ambaran yang jelas mengenai keadaan Pemerintah Daerah tersebut.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Hasil Penelitian

1.3 Gambaran Umum Kabupaten Langkat



Gambar 1.2 Peta Kabupaten Lngkat

Kabupaten Langkat merupakan sebuah kabupaten yang berada di provinsi Sumatera Utara yang beribu kota diantaranya termasuk kota Stabat. Dan berdasarkan Perda Nomor 11 tahun 1995 telah ditetapkan Hari Jadi Kabupaten Langkat 17 Januari 1750, dengan motto: “ Bersatu Sekata Berpadu Berjaya ”.

Kabupaten Langkat memiliki jarak rata-ratanya dari Kota Medan sekitar 60 km ke arah barat laut, dan berbatasan langsung dengan provinsi Nangroe Aceh Darusalam. Kabupaten Langkat beribu kota di Stabat. Wilayah Kabupaten Langkat terdiri dari 23 kecamatan yang tersebar di 3 wilayah yaitu, Wilayah I Langkat Hulu, Wilayah II Langkat Hilir, dan Wilayah III Teluk Haru.

Tabel 4.1
Rincian Wilayah Pemerintah Kabupaten Langkat

No	Kecamatan	Luas wilayah Km ²	Desa/ Kelurahan	Jarak Km
1	Bahorok	884,79	19	73
2	Serapit	122,95	10	60
3	Salapian	187,96	17	55
4	Kutambaru	244,11	8	65
5	Sei Bingai	338,45	16	45
6	Kuala	179,95	16	40
7	Selesai	152,08	14	30
8	Binjai	49,55	7	23
9	Stabat	90,64	12	-
10	Wampu	193,75	14	5
11	Batang Serangan	934,90	8	31
12	Sawit Seberang	435,07	7	28
13	Padang Tualang	274,91	12	36
14	Hinai	114,28	13	14
15	Secanggang	248,73	17	23
16	Tanjung Pura	165,78	19	18
17	Gebang	162,99	11	32
18	Babalan	101,80	8	40
19	Sei Lapan	306,81	14	40
20	Brandan Barat	92,00	7	45
21	Besitang	597,48	9	61
22	Pangkalan Susu	219,21	11	63
23	Pematang Jaya	165,10	8	75
	Kabupaten Langkat	6.263,29	277	-

1.4 Visi dan Misi BPKAD Kabupaten Langkat

Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat merupakan Lembaga yang mengelola keuangan dan aset daerah pada pemerintah Kabupaten Langkat diantaranya sebagai berikut:

1. Visi BPKAD Kabupaten Langkat

Adapun Visi Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah dirumuskan dan ditetapkan Daerah sebagai berikut : “Terwujudnya Sistem Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Langkat Berbasis Teknologi Informasi”

a. Terwujudnya

Mengandung pengertian tercapainya suatu keadaan atau kondisi yang diharapkan atau diinginkan dimasa depan.

b. Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah

Merupakan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan dan barang daerah yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau perolehan lainnya yang sah dalam bentuk barang bergerak maupun barang tidak bergerak.

c. Berkualitas

Artinya pengelolaan keuangan harus bersifat akuntabel dalam artian dapat dipertanggungjawabkan secara integritas, jujur dan taat terhadap peraturan perundang-undangan, dikelola secara profesional dengan mengedepankan efisiensi dan efektifitas yang di dukung oleh sistem administrasi yang tertib berdasarkan tata cara dan prosedur yang benar.

d. Berbasis Teknologi Informasi

Bahwa pengelolaan keuangan dibangun atas dasar pengembangan teknologi dan kebebasan arus informasi dimana segala proses yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan dan aset daerah dilakukan secara komputerisasi dan aksesnya dapat secara langsung dilihat dan diterima oleh mereka yang membutuhkan.

2. Misi BPKAD Kabupaten Langka

Untuk mewujudkan Visi yang telah ditetapkan, Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten Langkat sebagai berikut:

- a. Meningkatkan kualitas dan sinergitas pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- b. Meningkatkan sistem pengendalian intern dalam rangka pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- c. Membangun sarana dan prasarana serta pengembangan teknologi informasi dalam pengelolaan keuangan dan aset daerah.
- d. Meningkatkan kualitas dan kuantitas sumber daya pengelolaan keuangan dan aset daerah.

B. Deskripsi Data

3. Analisis Kinerja Keuangan Daerah

1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah merupakan rasio yang menunjukkan seberapa besar pemerintah daerah sudah mampu mengelola atau membiayai kegiatan pemerintah daerahnya tanpa bantuan dari pihak eksternal seperti

pemerintah pusat ataupun provinsi. Rasio Kemandirian Keuangan Daerah juga menunjukkan bahwa pemerintah daerah sudah mampu melaksanakan otonomi daerahnya dengan baik.

Rasio kemandirian keuangan daerah dapat dihitung dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{Pendapatan Asli Daerah}}{\text{Pendapatan Transfer}} \times 100\%$$

$$\text{Tahun 2011} = \frac{34.540.642.904,35}{1.055.735.281.773,00} \times 100\% = 3,27\%$$

$$\text{Tahun 2012} = \frac{129.242.580.780}{1.199.681.652.853,00} \times 100\% = 10,77\%$$

$$\text{Tahun 2013} = \frac{65.521.499.189,41}{1.419.706.153.815,00} \times 100\% = 4,62\%$$

$$\text{Tahun 2014} = \frac{107.811.975.547,21}{1.540.371.084.996,00} \times 100\% = 4,62\%$$

$$\text{Tahun 2015} = \frac{122.715.359.909,79}{1.804.265.890.307,00} \times 100\% = 6,80\%$$

Tabel 4.2
Perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun	PAD	Total Pendapatan Transfer	Rasio Kemandirian Keuangan Daerah	Pola Hubungan
2011	34.540.642.904,35	1.055.735.281.773,00	3,27%	Instruktif
2012	129.242.580.780,08	1.199.681.652.853,00	10,77%	Instruktif
2013	65.521.499.189,41	1.419.706.153.815,00	4,62%	Instruktif
2014	107.811.975.547,21	1.540.371.084.996,00	6,99%	Instruktif
2015	122.715.359.909,79	1.804.265.890.307,00	6,80%	Instruktif

Sumber : Laporan Realisasi APBD Kabupaten Langkat (diolah) 2017

Berdasarkan hasil perhitungan Tabel 4.2 diatas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat tergolong masih sangat rendah dan pola hubungannya instruktif dimana peranan pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian Pemerintah Daerah. Nilai data yang dapat disimpulkan ialah pada tahun 2011 rasio kemandirian yang mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya hanya sebesar 3,27%, tahun 2012 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 10,7%, tahun 2013 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 4,67%, tahun 2014 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 6,99%, dan pada tahun 2015 mengindikasikan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat untuk memenuhi kegiatan pemerintahannya sebesar 6,80%.

Penurunan yang terjadi untuk tingkat rasio kemandirian pemerintah daerah Kabupaten Langkat, hal ini terjadi dikarenakan meningkatnya pemberian dana pemerintah pusat pada pemerintah daerah Kabupaten Langkat, yang artinya Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat dapat dikatakan belum mampu dalam menggunakan dana dari PAD yang digunakan untuk mengelola keuangan daerah tersebut. Dengan kata lain Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat masih bergantung pada Pemerintah Pusat guna menjalankan kegiatan daerah. Rasio kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah kabupaten langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat. Jadi Kemandirian

keuangan Pemerintah Kabupaten Langkat secara keseluruhan dapat dikatakan rendah, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

4. Analisis Kemampuan Keuangan Daerah

1.2 Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*

- a. Perhitungan dan Analisis Kinerja PAD melalui ukuran *share* dan *growth*.

$$\text{Rumus : } \textit{Share} = \frac{\textit{PAD}}{\textit{Total Belanja}} \times 100\%$$

$$\textit{Growth} = \frac{\textit{PAD}_i}{\textit{PAD}_{i-1}} \times 100\%$$

$$2011 = \textit{Growth} = \frac{34.540.642.904}{31.357.008434} \times 100\% = 110.152864\%$$

$$\textit{Share} = \frac{34.540.642.904}{1.063.869.134.063} \times 100\% = 3.2467\%$$

$$2012 = \textit{Growth} = \frac{129.242.580.780}{34.540.642.904} \times 100\% = 374.175377\%$$

$$\textit{Share} = \frac{129.242.580.780}{1.329.229.102.792} \times 100\% = 9.723123\%$$

$$2013 = \textit{Growth} = \frac{65.521.499.189}{129.242.580.780} \times 100\% = 50.696526\%$$

$$\textit{Share} = \frac{65.521.499.189}{1.536811928028} \times 100\% = 50.696526\%$$

$$2014 = \textit{Growth} = \frac{107.811.975.547}{65.521.499.189} \times 100\% = 6.745475\%$$

$$\textit{Share} = \frac{107.811.975.547}{1.780.922.935.500} \times 100\% = 6.053714\%$$

$$2015 = \text{Growth} = \frac{122.715.359909}{107.811.975.547} \times 100\% = 113.823496\%$$

$$\text{Share} = \frac{122.715.359.909}{1.819.224.899.770} \times 100\% = 6.745475\%$$

Tabel 4.3
Share APBD
Pemerintah Kabupaten Langkat

Tahun	PAD	Total belanja	Share
2011	34.540.642.904,35	1.063.869.134.063,82	3,2467004%
2012	129.242.580.780,08	1.329.229.102.792,52	9,723123%
2013	65.521/499.189,41	1.536.811.928.028,03	4,263469%
2014	107.811.975.547,21	1.605.301.211.464,57	6,7159966%
2015	122.715.359.909,79	1.819.224.899.770,10	6,745475%
	Rata-rata Share		6,13895268%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011-2015 (Data diolah).

Tabel 4.3
Growth APBD
Pemerintahan Kabupaten Langkat

Tahun	PADi	PAD-1	Growth
2011	34.540.642.904,35	31.357.008.434,92	110,1528642%
2012	129.242.580.780,08	34.540.642.904,35	374,175377%
2013	65.521.499.189,41	129.242.580.780,08	50,696526%
2014	107.811.975.547,21	65.521.499.189,41	164,544272%
2015	122.715.359.909,79	107.811.975.547,21	113,8234962%
	Rata-rata Growth		162,67850708%

Sumber : Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun 2011-2015 (Data diolah).

b. Analisis Peta Kemampuan Kemampuan Keuangan Daerah,

Dalam hasil perhitungan *Share* dan *Growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh data *Share* sebesar 6,13895268% dan *Growth* sebesar 162,67850708% kemudian dengan pemetaan kemampuan keuangan daerah berdasarkan Metode Kuadran, posisi Kabupaten Langkat pada

kuadran II, yaitu kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensial lokal, sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi.

C. Pembahasan

1.1 Rasio Kemandirian Keuangan Daerah

Rasio Kemandirian Keuangan Daerah menunjukkan kemampuan pemerintah Kabupaten Langkat dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintah. Berdasarkan perhitungan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah yang telah dilakukan menunjukkan Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sebesar 3,27%, tahun 2012 sebesar 10,77%, tahun 2013 sebesar 4,62%, tahun 2014 sebesar 6,99% dan tahun 2015 sebesar 6,80%. Sehingga menunjukkan pemerintah Kabupaten Langkat belum mandiri dalam membiayai kegiatan pemerintahannya, pemerintah daerah Kabupaten Langkat masih tergantung pada penerimaan pendapatan transfer. Hal ini sejalan dengan pendapat (Abdul Halim. 2004) yang menyatakan, Semakin tinggi rasio kemandirian mengandung arti bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap bantuan pihak eksternal (terutama pemerintah pusat dan provinsi) semakin rendah, dan semakin rendah rasio kemandirian maka semakin tinggi ketergantungan daerah pada bantuan pihak eksternal.

Kemudian Rasio Kemandirian Keuangan Daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 sampai dengan 2015 berdasarkan perhitungan Kemandirian Keuangan daerah pemerintah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 sampai dengan 2015

menunjukkan pola Instrukturif. Dilihat dari pendapatan hasil daerah Kabupaten Langkat pada tahun 2011 RP. 34.540.642.904,35 sebesar 0,38% dari total pendapatan, tahun 2012 pendapatan asli daerah naik menjadi RP. 129.242.580.780,08 sebesar 1,78% dari total pendapatan, tahun 2013 pendapatan asli daerah turun menjadi RP. 65.521.499.189,41 sebesar 1,01% dari total pendapatan, tahun 2014 pendapatan asli daerah kembali mengalami kenaikan sebesar RP. 107.811.975.547,21 sebesar 1,81% dari total pendapatan dan tahun 2015 pendapatan asli daerah naik dari tahun sebelumnya sebesar RP.122.715.359.909,79 dengan persentase 2,47% dari total pendapatan.

Jika dilihat dari tahun ke tahun pola Kemandirian Keuangannya masih tergolong hubungan instruktif karena masih tergolong interval 0-25%. Hal ini menunjukkan Kemandirian Keuangan daerah Kabupaten Langkat berupa pola Instrukturif yang berarti pemerintah Kabupaten Langkat belum mandiri atau rendah sekali dalam mengelola keuangan daerahnya. Peran pemerintah pusat lebih dominan dari pada kemandirian pemerintah daerah.

Jika Kemandirian Keuangan Kabupaten Langkat secara keseluruhan dapat dikatakan sangat rendah sekali, hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi. Daerah belum mampu mengoptimalkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya. Kesadaran dan partisipasi masyarakat akan pembayaran pajak dan retribusi juga salah satu hal yang menyebabkan PAD untuk membiayai pembangunan daerahnya.

Menurut uraian diatas dapat disimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah selama lima tahun pada Pemerintah Kabupaten Langkat

memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dalam kategori pola hubungan Instruktif, yaitu peranan pemerintah pusat masih sangat dominan dibandingkan pemerintah daerah, hal ini dapat dilihat dari Rasio Kemandirian Keuangan Daerah masih tergolong dalam interval 0-25%. Rasio Kemandirian yang masih rendah menggambarkan kemampuan keuangan daerah Kabupaten Langkat dalam membiayai pelaksanaan pemerintah dan pembangunan daerah masih sangat tergantung bantuan dari pemerintah pusat.

Hasil penelitian ini juga masih relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Puput Rizky Pramita (2015) yang menyimpulkan bahwa Rasio Kemandirian Keuangan Daerah pada Kabupaten Langkat memiliki rata-rata kemandiriannya masih tergolong rendah sekali dan dalam kategori instruktif. Hal ini menggambarkan bahwa tingkat ketergantungan daerah terhadap sumber dana ekstern masih sangat tinggi.

Hasil penelitian ini juga masih relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Layra KS (2016) yang menyimpulkan bahwa hasil penelitian ini menyatakan bahwa rasio kemandiriannya masih dibawah standar keuangan daerah terjadi dikarenakan kurang mampunya pemerintah kota dalam meningkatkan PAD sehingga menyebabkan pemerintah daerah tergantung pada pemerintah pusat.

Penyebab Pemerintah Daerah Belum Mandiri

1. Ketergantungan pemerintah daerah kepada subsidi pemerintah pusat yang tercermin dari besarnya bantuan pusat baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.

2. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan pendapatan transfer.
3. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
4. Masih tingginya jumlah belanja rutin dari pada belanja modal daerah
5. Belum mandirinya pemerintah daerah dalam melakukan pembiayaan belanja pemerintahannya.

1.2 Perhitungan dan Analisis *Share* dan *Growth*

Berdasarkan Perhitungan Analisis *Share* dan *Growth* pemerintah daerah Kabupaten Langkat tahun 2011 *Share* 3,2467004% *Growth* 110,1528642%, tahun 2012 *Share* 9,723123% *Growth* 374,175377%, tahun 2013 *Share* 4,263469% *Growth* 50,696526%, tahun 2014 *Share* 6,7159966% *Growth* 164,544272% dan tahun 2015 *Share* 6,745475% *Growth* 113,8234962%. Dan rata-rata *Share* selama tahun 2011 sampai dengan 2015 sebesar 6,13895268% dan rata-rata nilai *Growth* sebesar 162,67850708% hal ini menunjukkan bahwa nilai *share* (rendah) dan *growth* (tinggi).

Nilai *share* sebesar 6,13895268% termasuk dalam katagori rendah, hal ini berarti bahwa daerah belum memiliki kemampuan dalam membiayai belanja daerah, sedangkan nilai *growth* sebesar 162,67850708% tergolong tinggi yang mana Pendapatan Asli Daerah (PAD) tinggi.

Dari perhitungan analisis *Share* dan *Growth* dapat dilihat bahwa *share* (rendah) sedangkan *growth* (tinggi), ini termasuk dalam kuadran II yang mana kondisi ini belum ideal, tetapi daerah mempunyai pengembangan potensial lokal,

sehingga PAD berpeluang memiliki peran besar dalam Total Belanja. Sumbangan PAD terhadap Total Belanja masih rendah namun pertumbuhan (*growth*) PAD tinggi. Ini berarti pemerintah Kabupaten Langkat masih dapat menggali potensi daerah lebih maksimal, sehingga dapat meningkatkan PAD yang berperan besar pada APBD.

Hasil penelitian ini juga masih relevan dengan penelitian terdahulu yang dilakukan oleh Astriana Nabila Muhibtari (2014) hasil penelitiannya menyatakan perhitungan dan analisis kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan kota masih belum ideal, dilihat dari hasil perhitungan Share dan Growth terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Penyebab rendahnya kontribusi PAD terhadap Total Belanja

1. Masih adanya sumber pendapatan potensial yang dapat digali oleh pemerintah daerah akan tetapi berada diluar wewenang pemerintah daerah.
2. Rendahnya tingkat hidup ekonomi masyarakat yang tercermin dalam pendapatan perkapita.
3. Kurang mampunya pemerintah daerah dalam menggali sumber-sumber pendapatan yang ada.

BAB V

PENUTUP

C. Kesimpulan

Berdasarkan dari analisis kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat berdasarkan penelitian yang diukur melalui rasio keuangan daerah adalah sebagai berikut:

1. Ada beberapa faktor yang menyebabkan pemerintah daerah belum mandiri dari segi keuangan diantaranya sebagai berikut:
 - a. Bantuan pusat baik lebih besar baik dari sudut anggaran rutin yaitu melalui subsidi daerah otonom maupun dari sudut anggaran pembangunan yaitu bantuan pembangunan daerah.
 - b. Rendahnya kemampuan daerah untuk menggali sumber pendapatan asli daerah yang tercermin dari penerimaan pendapatan asli daerah (PAD) yang relatif kecil dibandingkan Pendapatan Transfer.
 - c. Kurangnya usaha dan kemampuan pemerintah daerah mengelola dan menggali sumber pendapatan yang ada.
 - d. Masih tingginya jumlah belanja rutin dari pada belanja modal daerah.
2. Berdasarkan hasil perhitungan dan analisis Kemampuan Keuangan Daerah dapat disimpulkan, bahwa kondisi kemampuan keuangan Kabupaten Langkat masih belum ideal. Dilihat dari hasil perhitungan *share* dan *growth* terhadap Ringkasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Langkat Tahun Anggaran 2011 sampai dengan 2015, maka diperoleh data *Share* sebesar 6,13895268% dan *Growth* 162,67850708%, sehingga posisi Kabupaten Langkat berada pada kuadran II yang berarti berada pada kondisi

yang belum ideal. Tandanya, Pemerintah Daerah Kabupaten Langkat masih harus menggali lebih dalam lagi potensi yang dimiliki daerah, sehingga lebih dapat meningkatkan PAD yang berperan besar dalam APBD.

D. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka saran yang dapat diberikan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

Pemerintah Kabupaten Langkat Seharusnya lebih mampu meningkatkan dan memaksimalkan Pendapatan Asli Daerah. Sehingga potensi yang dimiliki Kabupaten Langkat mempunyai dampak yang besar bagi masyarakat sekitar yang berpengaruh terhadap peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Dengan meningkatkan dan memaksimalkan potensi daerah yang dimiliki Kabupaten Langkat juga akan lebih mandiri sedikit demi sedikit terhadap ketergantungan pemerintah pusat.

Dilihat dari kemampuan keuangan daerah melalui perhitungan dan analisis *Share* dan *Growth* keseimbangan antar belanja belum menunjukkan kata seimbang. Pemerintah Daerah seharusnya lebih cenderung menggunakan untuk kegiatan belanja langsung dan Belanja Modal, Belanja Barang dan Jasa untuk meningkatkan kualitas output, sehingga fungsi anggaran sebagai alat distribusi, alokasi, stabilisasi bisa berjalan dengan baik. Pemerintah Kabupaten Langkat harus mengurangi ketergantungan terhadap dana bantuan dari Pemerintah pusat, agar dapat mencapai kondisi tingkat kemampuan keuangan yang ideal. caranya dengan mengoptimalkan potensi yang ada untuk meningkatkan PAD yang dapat digunakan untuk mengurangi besarnya dana bantuan yang berikan oleh Pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul Halim. (2007). *Akuntansi sektor Publik*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2007). *Akuntansi Sektor Publik : Akuntansi Keuangan Daerah*. Jakarta: Salemba Empat.
- _____. (2008). *Auditing (Dasar-Dasar Audit Laporan Keuangan)* (edisi keempat). Yogyakarta: Unit Penelitian Percetakan STIM YKPN.
- _____. (2012). *Akutansi Keuangan Daerah*. Salemba Empat. Jakarta.
- Agus Dwiyanto (2003). *Kinerja Tata Pemerintah Daerah di Indonesia*.
- Astriana Nabila Muhibtari (2014). “*Analisis rasio Keuangan Anggaran dan Belanja Daerah Kota Magelang untuk Menilai KInerja Keuangan Pemerinatah Daerah Kota Magelang Tahun Anggaran 2008-2012*”. Skripsi Akuntansi.
- Anom Rubit Yasudi (2016). “*Analisis Kinerja Keuangan Rasio Share Growth Pada Dianas Pendapatan Kota Kendari*”. Skripsi Akuntansi
- Bastian Indra. (2006) . *Akuntansi Sektor Publik : Suatu Pengantar*. Jakarta: Erlangga.
- BAPPENAS. *Peta Kemampuan Keuangan Provinsi Dalam Era Otonomi Daerah*. Direktorat Pengembangan Otonomi Daerah. *Jurnal*
- Harahap (2004). “ *Analisis Kinerja Keuangan Pemerintah Kabupaten Dan Pemerintah Kota Di jawa Tengah*”. Skripsi
- Ihyaul Ulum, MD (2004). “*Akuntansi Sektor Publik* (sebuah pengantar). Malang: Universitas Muhammadiyah Malang.
- Ihyanul Ulum, (2009). *Audit Sektor Publik*, Jakarta : PT Bumi Aksara.
- Syafrida Hani. (2015). *Analisis Laporan Keuangan*. Jakarta.
- Layra KS (2016). “*Analisis Rasio Keuangan Daerah dalam Menilai Kinerja Keuangan Pemerintah Kota Medan*”. Skripsi Akuntansi
- Mahmudi (2010). “ *Analisis Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Edisi Dua*. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.
- Mardiasmo (2002). *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta : Penerbit Andi.

Moh. Mahsun. (2011). Pengukuran Kinerja Sektor Publik. BPFE. Yogyakarta.

Muhibtari (2014). “ *Evaluasi Kinerja dan Kemampuan Keuangan Daerah pada Dinas Pendapatan Pengelolaan dan Aset daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi

Puput Rizky Pramita (2015). “Analisis Rasio Untuk Menilai Kinerja Keuangan Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2009-2013”. *Skripsi Akuntansi*. Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, April 2015.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 71 Tahun 2010. *Tentang Standar akuntansi Pemerintahan*.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 108 Tahun 2000. Tentang Pedoman Organisasi Daerah.

Peraturan Pemerintah PP Nomor 58 Tahun 2005. *Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah: Pasal 4*.

Pemendagri Nomor 13 Tahun 2006. *Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah. Pasal 1 No. 37 Pasal 4 No. 5*.

Pemandagri Nomor 4 Tahun 2008. *Tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah*.